

Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Pulau Sumatera

Fitrian Rizky¹, Azhari Azhari², Rahmat Arfan³

^{1,3}Politeknik Kutaraja, Banda Aceh

¹fitrianrizky@poltekkutaraja.ac.id

³rahmatarfan@poltekkutaraja.ac.id

²Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen

²azharikuliah@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi kinerja keuangan pemerintah. Tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengalami hal serupa seiring dengan masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di Pulau Sumatera, dampak tersebut telah mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan adanya perubahan rencana keuangan untuk penanganan Covid-19. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja di Pulau Sumatera. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari masa sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019) dan selama pandemi Covid-19 (2020-2021) serta analisis uji beda sampel berpasangan dengan *wilcoxon signed-rank test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja serta pada rasio kemandirian keuangan daerah tidak terdapat perbedaan sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah, pandemi covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on the government's financial performance. Not only has an impact on the central government, local governments also experience similar things along with the massive spread of Covid-19 in Indonesia. On the island of Sumatra, this impact has resulted in the ability of local governments to finance governance due to changes in financial plans for handling Covid-19. This research aims to determine the differences in local government financial performance in terms of the degree of decentralization, the ratio of the degree of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence, the effectiveness ratio of local original income, and the ratio of expenditure efficiency on the island of Sumatra. The research method used is a quantitative method using secondary data from before the

Covid-19 pandemic (2018-2019) and during the Covid-19 pandemic (2020-2021) as well as analysis of paired sample difference tests with wilcoxon signed-rank test. The results showed that there were differences in the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of effectiveness of local original income, and the ratio of expenditure efficiency and in the ratio of regional financial independence there was no difference before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *regional financial performance, local government, covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

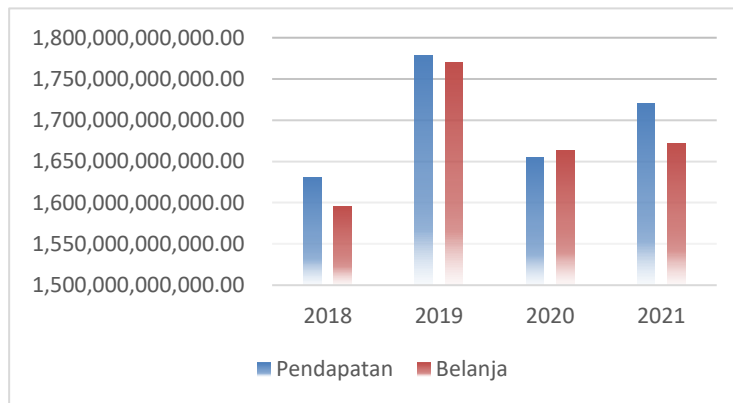
Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda seluruh belahan dunia diawali pada bulan oktober tahun 2019 di Pusat Kota Wuhan China dan mungkin secara global pandemi ini terjadi serempak pada Januari 2020 telah mempengaruhi tatanan kehidupan normal masyarakat (Budiman (2021) dan Handoyo (2021) . Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan adanya kasus tersebut, pemerintah dengan segala upaya menerapkan peraturan untuk menahan sebaran Covid-19 yang dimulai dengan Pembatasan Skala Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian pandemi Covid-19 ini resmi ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah (Sabiila, 2022). Tidak hanya diserang secara pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan, perekonomian seluruh daerah di Indonesia tidak hanya berdampak pada bisnis-bisnis masyarakat yang bangkrut karena kemerosotan ekonomi secara global akan tetapi juga memaksa pemerintah pusat maupun daerah melakukan relokasi pengelolaan anggaran untuk penanganan pandemi ini (Budiman (2021a) dan Kamal et al. (2022)).

Implementasi terkait kebijakan fiskal menjadi sangat penting dalam hal merespon dampak ekonomi yang signifikan yang disebabkan oleh PSBB (Kismawadi, 2023a). Pengelolaan dalam hal efisiensi dan responsibilitas keuangan daerah menjadi suatu aspek kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mendorong stimulus fiskal dengan meningkatkan pengeluaran publik dalam hal program bantuan sosial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dalam hal kecukupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan bagi sektor-sektor yang terdampak (Dayyan et al. (2019) dan Hamid et al. (2017)). Sejalan dengan teori Keynes, pemerintah dapat diberikan ruang untuk mengintervensi pengelolaan keuangan daerah dalam merespon dampak ekonomi yang signifikan (Keynes, 1936).

Menurut Namani (2021) intervensi negara dalam perekonomian masih relevan dan diperlukan dalam perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Peningkatan belanja daerah merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja baru ataupun pemberian subsidi secara langsung kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial ((Rugy & Jones (2021); Pang (2022); dan Chohan (2022)).

Peningkatan belanja daerah pada masa Covid-19, rata-rata pemerintah daerah di Indonesia cenderung merealokasi belanja ke belanja darurat (belanja tidak terduga). Upaya tersebut merupakan pelaksanaan otonomi daerah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi (Sulistiyono et al., 2022). Walau telah sesuai dengan peraturan, akan tetapi upaya peningkatan tersebut hanya akan mengurangi krisis kesehatan yakni kematian akibat Covid-19. Jika dilihat dari kinerja keuangan pemerintah, kecenderungan tersebut sejalan dengan perekonomian Indonesia, baik pendapatan maupun belanja pemerintah daerah yang mengalami penurunan di tahun pertama pandemi (Qibthiyyah, 2021).

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 7,36 persen dan 5,82 persen. Selain itu, kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD tahun 2020 juga menurun sebesar 7,53 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yaitu akibat kebijakan PSBB untuk mengurangi penularan kasus Covid-19 (Mayningrum & Muhtadi, 2021). Jika dilihat dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera juga mengalami hal yang serupa yang mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah harus dikelola dengan baik walau pandemi Covid-19 melanda. Adapun secara grafik dapat dilihat pada Grafik 1.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2022)

Grafik 1. Rerata Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi Covid-19 pencapaian keterserapan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah berbeda dari yang dihasilkan pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah baik dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera pada saat pandemi hanya dapat memaksimalkan anggaran belanja daerah untuk hal-hal penanganan pandemi Covid-19 dan pendapatan daerah tidak dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2021, transisi yang dilakukan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan akan tetapi keterserapan belanja daerah sungguh sangat jauh dari harapan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah pada masa transisi dan penanganan covid-19, pengelolaan keuangan daerah-nya hanya bergantung pada pendapatan transfer dari pusat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hak otonomi yang dimiliki masing-masing daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan demokratis (Rahmawati & Kiswara, 2022). Pengelolaan keuangan yang baik sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat (Sinulingga et al., 2022).

Salah satu alat otonomi daerah di Indonesia tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Memaknai hal tersebut pula, APBD

secara teknisnya disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003). APBD yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

LKPD yang dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri. Kinerja keuangan mencerminkan akuntabilitas bagi Pemda dalam memberikan pelayanan publik (Kismawadi (2023b) dan Puspita & Pangastuti, 2022). Analisis terhadap kinerja keuangan dapat dihitung dan diketahui melalui perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja. Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, maka bagaimana kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Lain halnya jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut (Vebiani et al., 2022). Keterbaruan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asiku et al. (2023) menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Anas (2021) menyebutkan bahwa wabah Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang hanya dilakukan pada 3 (tiga) provinsi dengan tingkat ketersebaran wabah tertinggi. Namun penelitian ini juga belum mengeksplorasi perbedaan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota dan provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan sebelumnya, tampak adanya ketidaksesuaian antara teori dan data penelitian, sekaligus terdapat ketidakselarasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Keberadaan kontradiksi dan inkonsistensi ini menunjukkan kompleksitas isu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini

Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019...* menjadi relevan dan menarik untuk dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta memperbaiki pemahaman yang mungkin telah terdistorsi sebelumnya.

METODE

Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Jaya, 2020). Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model kuantitatif deskriptif dengan uji beda sampel berpasangan serta data panel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang berjumlah 164 terdiri dari 10 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD periode tahun 2018-2021.

Operasionalisasi Variabel

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah variabel independen karena pengujian uji beda untuk sampel berpasangan hanya khusus pada variabel tersebut. Adapun operasionalisasi variabel kinerja keuangan ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri (Kepmendagri) (1996) Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan yang hingga saat ini masih digunakan oleh Pemda dalam menilai kinerja keuangan daerah dan dapat dilihat sebagai berikut.

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Adapun rasio perhitungan tingkat desentralisasi keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun rasio perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rasio perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

4) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Adapun rasio perhitungan tingkat efektivitas PAD dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

5) Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Adapun rasio perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan metode pendekatan kuantitatif dengan uji beda sampel berpasangan. Adapun tahapan analisis data untuk hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data penelitian yang digunakan tersebut normal atau tidak normal. Dalam uji beda, uji normalitas sangat diperlukan untuk melihat kesesuaian model uji beda yang akan digunakan apakah sesuai dengan uji beda pada statistik parametrik atau statistik non parametrik. Untuk mengetahui ketersebaran data dapat dikatakan normal atau tidak, maka peneliti menggunakan uji statistik melalui tes *Kolmogorov-Smirnov*.

2) Uji Beda t-Statistik

Uji beda dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan beda rata-rata dan sampel yang berkaitan atau berpasangan. Apabila ketersebaran data normal, maka uji beda yang digunakan adalah statistik parametrik dengan uji *paired sample t-test*. Jika ketersebaran data tidak normal, maka uji beda yang digunakan adalah statistik non parametrik dengan uji *wilcoxon signed-rank test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Derajat Desentralisasi _ Before Covid-19	.230	328	.000	.725	328	.000
Rasio Derajat Desentralisasi _ During Covid-19	.238	328	.000	.732	328	.000
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah _ Before Covid-19	.112	328	.000	.910	328	.000
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah _ During Covid-19	.121	328	.000	.949	328	.000
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah _ Before Covid-19	.268	328	.000	.626	328	.000
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah _ During Covid-19	.245	328	.000	.657	328	.000
Rasio Efektivitas PAD _ Before Covid-19	.137	328	.000	.714	328	.000
Rasio Efektivitas PAD _ During Covid-19	.137	328	.000	.795	328	.000
Rasio Efisiensi Belanja _ Before Covid-19	.114	328	.000	.912	328	.000
Rasio Efisiensi Belanja _ During Covid-19	.068	328	.001	.979	328	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat hasil dari uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*. Nilai signifikansi yang diperoleh dalam uji tersebut dari seluruh variabel diperoleh lebih kecil dari 5% (Sig. < 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal dan uji analisis selanjutnya yang akan digunakan adalah menggunakan statistik non parametrik dengan uji *wilcoxon signed-rank test*.

Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *wilcoxon signed-rank test*. Hasil pengujian tersebut untuk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji *Wilcoxon Signed-Rank Test*

	Test Statistics ^a					
	Rasio Derajat Desentralisasi _ During Covid-19 - Rasio Derajat Desentralisasi _ Before Covid-19	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah _ During Covid-19 - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah _ Before Covid-19	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah _ During Covid-19 - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah _ Before Covid-19	Rasio Efektivitas PAD _ During Covid-19 - Rasio Efektivitas PAD _ Before Covid-19	Rasio Efisiensi Belanja _ During Covid-19 - Rasio Efisiensi Belanja _ Before Covid-19	
Z	-3.380 ^b	-6.366 ^b	-1.147 ^c	-4.789 ^b	-9.122 ^c	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001	.000	.251	.000	.000	

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat hasil dari perhitungan *wilcoxon signed-rank test* untuk masing-masing hipotesis dalam penelitian ini dan analisis tersebut dapat dilihat berikut:

- 1) Nilai Z pada rasio derajat desentralisasi diperoleh sebesar -3,380 dengan tingkat signifikansi 0,001 (Sig. < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a1}) dalam penelitian ini diterima dan menolak hipotesis nol (H₀₁) yang mengandung makna bahwa terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi sebelum dan selama pandemi Covid-19;
- 2) Nilai Z pada rasio ketergantungan keuangan daerah diperoleh sebesar -6,366 dengan tingkat signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a2}) dalam penelitian ini diterima dan menolak hipotesis nol (H₀₂) yang mengandung makna bahwa terdapat perbedaan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19;
- 3) Nilai Z pada rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh sebesar -1,147 dengan tingkat signifikansi 0,251 (Sig. > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a3}) dalam penelitian ini ditolak dan menerima hipotesis nol (H₀₃) yang mengandung makna bahwa tidak terdapat perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19;
- 4) Nilai Z pada rasio efektivitas PAD diperoleh sebesar -4,789 dengan tingkat signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a4}) dalam penelitian ini diterima dan menolak hipotesis nol

(H₀₄) yang mengandung makna bahwa terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD sebelum dan selama pandemi Covid-19; dan

- 5) Nilai Z pada rasio efektivitas PAD diperoleh sebesar -9,122 dengan tingkat signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a5}) dalam penelitian ini diterima dan menolak hipotesis nol (H₀₅) yang mengandung makna bahwa terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Pembahasan

Perbedaan Rasio Derajat Desentralisasi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi sebelum dan selama pandemi covid-19 dimana diperoleh nilai Z sebesar -3,380 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05). Hal tersebut mengandung makna bahwa derajat desentralisasi dari pemerintah daerah pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 mengalami perbedaan dimana jika dilihat dari data penelitian mayoritas PAD dari seluruh pemerintah daerah di Pulau Sumatera dinilai sangat jauh dari pendapatan daerah walau pada saat pandemi maupun selama pandemi covid-19 (rata-rata cukup untuk aspek penerimaan PAD). Dengan adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa derajat desentralisasi yang bersifat otonomi yang dijalankan pemerintah daerah rata-rata sangat bergantung dari pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dalam membiayai anggaran pemerintah daerah terlebih lagi pada saat pandemi covid-19, pemerintah daerah sebagian besar hanya dapat mengelola anggaran dari pusat untuk penanganan covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cinintya et al. (2022) dan Habibi et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi sebelum dan selama pandemi covid-19. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nur et al., (2023); Rahmawati & Kiswara (2022; dan Vebiani et al. (2022) bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi sebelum dan selama pandemi covid-19.

Perbedaan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19 dimana diperoleh nilai Z sebesar -6,366 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05). Hal tersebut mengandung makna bahwa ketergantungan keuangan daerah pemerintah daerah di Pulau Sumatera kepada pemerintah pusat pada sebelum dan selama pandemi covid-19 sama-sama mengalami ketergantungan. Akan tetapi, perbedaan ketergantungan yang dialami selama pandemi covid-19 jauh diatas rata-rata ketergantungan daerah sebelum pandemi covid-19 melanda. Salah satu contohnya yaitu pendapatan transfer menjadi dominan sekali disaat pandemi covid-19 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata pendapatan transfer terjadi kenaikan signifikan pada tahun pada semester kedua tahun 2020 dan tahun 2021 dimana rata-rata dukungan dari pendapatan transfer ke dalam pendapatan daerah rata-rata hampir menyentuh angka 80%.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Asiku et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19.

Perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat tidak perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19 dimana diperoleh nilai Z sebesar -1,147 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,251 (Sig. < 0,05). Hal tersebut mengandung makna bahwa kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah sebelum selama pandemi di Pulau Sumatera memiliki kesamaan dan tidak ada perubahan yang berarti walau pandemi covid-19 melanda. Jika dilihat dari sebelum dan masa pandemi covid-19, rata-rata pemerintah daerah di Pulau Sumatera memperoleh PAD hanya berkisar dibawah 20% dan selebihnya didukung oleh pendapatan transfer serta rata-rata pemerintah daerah tersebut secara kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Alfansa & Wibowo (2022); Arfath & Priyono (2023); Asiku et al. (2023); Kusumawati (2023);

Rafael & Istianah (2022); Rahmawati & Kiswara (2022); dan Vebiani et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19. Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cinintya et al., (2022) bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19.

Perbedaan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD sebelum dan selama pandemi covid-19 dimana diperoleh nilai Z sebesar -4,789 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05). Hal tersebut mengandung makna bahwa efektivitas PAD pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 terdapat adanya perbedaan dan perubahan dalam hal pengelolaan dan target dari PAD. Pada saat terjadinya pandemi covid-19, efektivitas PAD mengalami penurunan daripada sebelum terjadinya pandemi covid-19. Walaupun begitu, efektivitas PAD dapat dikatakan efektif dalam dua kondisi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alfansa & Wibowo (2022); Arfath & Priyono (2023); Kusumawati (2023); Rafael & Istianah (2022); Rahmawati & Kiswara (2022); dan Vebiani et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio efektivitas PAD sebelum dan selama pandemi covid-19. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Asiku et al., (2023) dan Cinintya et al., (2022) bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio efektivitas PAD sebelum dan selama pandemi covid-19.

Perbedaan Rasio Efisiensi Belanja Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rasio efisiensi belanja sebelum dan selama pandemi covid-19 dimana diperoleh nilai Z sebesar -9,122 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05). Hal tersebut mengandung makna bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah di Pulau Sumatera pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 terdapat adanya perbedaan dalam hal pengelolaan efisiensi belanja pada anggaran. Sebelum terjadinya pandemi covid-19, rata-rata efisiensi pemerintah daerah kurang efisien dan tidak efisien. Berbeda dengan pada saat pandemi covid-19, efisiensi belanja rata-rata cukup efisien

Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019...* sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pada saat pandemi covid-19 jauh lebih baik dari pada sebelum pandemi covid-19. Kondisi tersebut disinyalir bahwa pemerintah daerah pada saat pandemi covid-19 tidak dapat memaksimalkan belanja daerah yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun anggaran karena keterbatasan keleluasaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proyek-proyek yang terhambat dengan adanya peraturan PSBB.

Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vebiani et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio efisiensi belanja sebelum dan selama pandemi covid-19. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arfath & Priyono (2023); Asiku et al., (2023); Kusumawati (2023); dan Rafael & Istianah (2022) bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio efisiensi belanja sebelum dan selama pandemi covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami implikasi yang signifikan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pertama-tama, rasio derajat desentralisasi memperlihatkan perbedaan yang mencolok sebelum dan selama pandemi, mencerminkan dampak signifikan pada tingkat otonomi dan pengambilan keputusan keuangan daerah. Selain itu, rasio derajat ketergantungan daerah juga menunjukkan perubahan yang signifikan, menggambarkan bagaimana ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam kestabilan keuangan daerah selama krisis. Sementara itu, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja menunjukkan variasi yang mencolok sebelum dan selama pandemi, mencerminkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan serta efisiensi belanja dalam situasi krisis.

Namun, menariknya, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Pulau Sumatera. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong relatif stabil dan tidak banyak terpengaruh oleh perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

KESIMPULAN

Secara umum, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan yang mencolok dalam beberapa aspek kinerja keuangan daerah selama periode sebelum dan selama pandemi. Rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja menunjukkan perbedaan yang signifikan, mencerminkan tantangan dan adaptasi kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi dampak pandemi.

Namun, perlu dicatat bahwa kinerja keuangan yang dievaluasi dari perspektif rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketidakberbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Pulau Sumatera. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah mungkin relatif stabil dan kurang terpengaruh oleh perubahan ekonomi yang diinduksi pandemi.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambah populasi dan sampel maupun objek penelitian yang dapat dilakukan pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada pulau-pulau besar lain di Indonesia seperti Pulau Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini untuk pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan kinerja keuangan daerah dan dapat mengambil pembelajaran dalam meningkatkan ketahanan keuangan dan menyesuaikan kebijakan di masa krisis.

PUSTAKA ACUAN

- Alfansa, R., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 04(03), 150–168.
- Anas, M. (2021). Impact of Pandemic COVID-19 on Local Government's Financial Performance in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(3), 196–206. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.16>
- Arfath, D. M., & Priyono, N. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440–451. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Asiku, S. N. H., Bokuu, Z., & Panigoro, N. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 64–75.

- Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019*...
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021*.
- Budiman, I. (2021a). Converting Conventional Banks To Sharia Banks in Aceh: an Effort To Maintain a Stable Economy in the Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 252–275. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>
- Chohan, U. W. (2022). The Return of Keynesianism? Exploring Path Dependency and Ideational Change in Post-Covid Fiscal Policy. *Policy and Society*, 41(1), 68–82. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puab013>
- Cinintya, C., Gamayuni, R., & Dharma, F. (2022). Analysis of The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia. *ICEBE Journal*, 2–8. <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316233>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'Wah Experience, Spiritual, and Economic Resilience of Jamaah Tabligh in Langsa. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 203–220. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>
- Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Hamid, A., Majid, M. S. Abd., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6(2), 219–232. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022>
- Handoyo. (2021, June 27). *Kasus pertama COVID-19 mungkin melanda China sejak Oktober 2019*. Internasional.Kontan.Co.If. <https://internasional.kontan.co.id/news/kasus-pertama-covid-19-mungkin-melanda-china-sejak-oktober-2019>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kamal, S., Hidayah, N., Junaidi, & Tabrani. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795–4807.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), Pub. L. No. 690.900.327, Pemerintah Indonesia (1996).
- Kismawadi, E. R. (2023a). Contribution of Islamic banks and macroeconomic variables to economic growth in developing countries: vector error correction model approach (VECM). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, January. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>
- Kismawadi, E. R. (2023b). Improving Islamic bank performance through agency cost and dual board governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, October. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0035>
- Kusumawati, D. (2023). The Impact of The Covid-19 Pandemic On The Financial Performance of The Banten Provincial Government For The Fiscal Year 2019–2020. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.4801>
- Mayningrum, S., & Muhtadi, K. (2021). i-SMARTS: Digitalization of

- Agrotechnopreneurship-Based MSME Development to Support Acceleration of East Java Economic Recovery in The Middle of The Covid-19 Pandemic. *East Java Economic Journal*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i1.56>
- Namani, A. (2021). The Rebirth of Keynes During The Covid-19 pandemics - A Theoretical Approach. *CES Working Papers*, XIII(4), 347–366. www.ceswp.uaic.ro
- Pang, Y. (2022). A Theory of Fiscal Policy Response to An Epidemic. *Health Economics (United Kingdom)*, 31(9), 2050–2071. <https://doi.org/10.1002/hec.4564>
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1), 90–104. <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>
- Qibthiyah, R. M. (2021). Province and Local Finances in Indonesia During Covid-19 Pandemic. In *LPEM-FEBUI Working Paper* (Vol. 059).
- Rafael, S. J. M., & Istianah, I. (2022). Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rugy, V. de, & Jones, G. (2021). *Keynesian Stimulus: A Virtuous Semicircle?* Mercatus Center or George Mason University.
- Sabiila, S. I. (2022, March 2). *Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu>
- Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen STIE LMII Medan*, 8(1), 89–106.
- Sulistiyono, S. W., Suliswanto, M. S. W., Dewa, P. K., Santosa, S., & Astina, C. (2022). Revenue optimization strategy through digitizing retribution parking in Kota Batu. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 21(4), 455–461. <https://doi.org/10.1057/s41272-021-00333-y>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 1 (2003).
- Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 113–126. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/48137%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/download/48137/19563>